



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Jenderal Sudirman, Painan Telp. (0756) 7464131, Fax. (0756) 7464085

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

REVISI PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 yang mengamanatkan adanya penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Badan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- : Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Oktober 2017

KEPALA BAPEDALITBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN


YOZKI WANDRI, S.Pi. M.Si.
NIP. 19750101 200303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 (Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 dan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyusunan Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Bapedalitbang sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi Bapedalitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bapedalitbang tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

Renstra merupakan komitmen Bapedalitbang yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapedalitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang
Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”***

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pememerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Bapedalitbang adalah melakukan Penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Megoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bapedalitbang sebagai institusi Perencanaan Pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 sebagai berikut:

- **BAB 1 Pendahuluan** terdiri atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Bapedalitbang dan Sistematika Penulisan;

- **BAB II Gambaran Umum Pelayanan OPD** memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD;
- **BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi** memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga serta Dinas Terkait di Provinsi;
- **BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** memuat Telaahan Visi dan Misi RPJMD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan Prioritas;
- **BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif** memuat rencana program dan kegiatan, pendanaan indikatif;
- **BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD** memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- **BAB VII Kaidah Pelaksanaan**
- **BAB VIII Penutup**

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Bidang perencanaan dimaksud meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

b. Fungsi :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka menengah Daerah.
3. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
5. Melakukan kerjasama dan koordinasi Perencanaan dengan Dinas/Instansi/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Melakukan pengendali terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Melakukan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk dan arahan Bupati.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala, bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya
2. Sekretariat. Sekretariat Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Bapedalitbang di bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Penyusunan Rencana Kegiatan di lingkungan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
4. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber daya Manusia, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintah dan Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM, SDA, Lingkungan , Inovasi dan Teknologi.
6. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang dalam melaksanakan Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang pengenddalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Sub Bidang Analisa Data Base Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan.

2.2 Sumber Daya

Jumlah pegawai di lingkungan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 52 orang, dengan perincian :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang
2. Tenaga Harian Lepas sebanyak 14 orang
3. Kepangkatan / golongan :
 - Pembina Utama Muda (IV/c) 0 orang
 - Pembina Tingkat I (IV/b) 3 orang
 - Pembina (IV/a) 5 orang
 - Penata Tingkat I (III/d) 8 orang
 - Penata (III/c) 7 orang
 - Penata Muda Tingkat I (III/b) 5 orang
 - Penata Muda (III/a) 2 orang
 - Pengatur (II/c) 7 orang
 - Pengatur Muda Tk. I (II/b) 2 orang
4. Jenjang Pendidikan
 - Tamat SLTA 8 orang
 - Sarjana 18 orang
 - Pasca Sarjana 13 orang
5. Perlengkapan
 - Gedung 2 buah
 - Ruang Rapat 6 buah
 - Ruang Kepala 1 buah
 - Ruang Sekretaris 1 buah
 - Ruang Kepala Bidang 4 buah
 - Ruang Bendaharawan 1 buah
 - Meja 104 buah
 - Kursi 500 buah
 - Komputer 37 unit
 - Kendaraan bermotor roda empat 3 buah
 - Kendaraan bermotor roda dua 7 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Bapedalitbang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, Indikator kinerja pelayanan Bapedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen Review dan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Tersedianya dokumen Review dan Revisi perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
4. Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
5. Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan pembangunan
6. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
7. Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya
8. Tersedianya dokumen perencanaan fisik dan prasarana
9. Terciptanya Inovasi-inovasi bagi generasi muda.
10. Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Tersedianya dokumen Kajian strategis tentang pembukaan jalan Muara Labuah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapedalitbang

Bapedalitbang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar tetap

sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan. Analisis terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi strength (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunitiy* (peluang) dan *threaths* (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai
- Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai
- Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja
- Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan

b. Kelemahan

- Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- Belum terisnya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan dan manajemen pelayanan publik
- Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah
- Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan daerah
- Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap Bapedalitbang
- Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bapedalitbang
- Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan
- Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah

b. Ancaman

- Lemahnya koordinasi antar OPD
- Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel
- Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat OPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran berbasis kinerja
- Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi *real* saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

A. Masalah Keagamaan

- a) Belum terfasilitasinya kelembagaan sosial keagamaan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- b) Belum teraktualisasikannya pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat yang berakibat masih tingginya angka rata-rata penyakit masyarakat dan kriminalitas.

B. Masalah Pendidikan

- a) Belum efektifnya penggunaan dana BOS
- b) Masih adanya ketimpangan dalam pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
- c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga guru

C. Masalah Kesehatan

- a) Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu
- b) Kurangnya sanitasi lingkungan
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat
- d) Masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).
- e) Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan

D. Masalah Kemiskinan

- a) Keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan perumahan.
- b) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
- c) Terbatasnya kesempatan bekerja dan peluang berusaha.
- d) Rendahnya penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian dan sarana usaha.
- e) Terbatasnya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- f) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat miskin dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

E. Masalah Ketenagakerjaan

- a) Bertambahnya penduduk akan mempengaruhi meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.
- b) Menyempitnya lapangan pekerjaan akibat perubahan kegiatan ekonomi.
- c) Rendahnya produktivitas pekerja.
- d) Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi pekerja serta perbedaan upah yang sangat mencolok antara pekerja formal dan informal.

F. Masalah Pertanian (pertanian, perikanan, kelautan, peternakan dan perkebunan)

- a) Ketersediaan air irigasi masih tergantung sumber air dari daerah lain sehingga sering menimbulkan konflik kepentingan diantara pemanfaat sumber air.
- b) Sering terjadinya banjir dan kekeringan pada lahan pertanian sebagai akibat kurang berimbangnya penyediaan sarana penampung air dengan pengaturan pemanfaatan air sehingga kondisi demikian sangat merugikan petani.
- c) Belum optimalnya peran serta lembaga petani dan lemahnya posisi tawar petani berakibat pada tata niaga pertanian yang kurang mendukung petani.
- d) Semakin sempitnya lahan pengusahaan bagi petani berakibat pada lemahnya upaya peningkatan kapasitas produksi dan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup petani.
- e) Lemahnya kemampuan petani dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
- f) Terbatasnya infrastruktur dan pasokan pupuk, benih dan bibit bagi petani.
- g) Harga sarana produksi perikanan yang terus melambung menyebabkan tingginya biaya produksi
- h) Keterbatasan kepemilikan sarana dan alat tangkap bagi nelayan.
- i) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan kelautan dan perikanan

- j) Minimnya lembaga keuangan yang menyalurkan modal untuk usaha kelautan dan perikanan walaupun ada persyaratannya sulit dipenuhi
- k) Rendahnya aksesibilitas masyarakat perikanan terhadap ilmu dan teknologi perikanan
- l) Konflik kepentingan antar masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terutama dalam penggunaan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
- m) Infrastruktur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih kurang memadai juga dukungan permodalan dari lembaga keuangan yang masih minim.
- n) Lemahnya kemampuan petenak dalam menghasilkan komoditas tinggi
- o) Belum optimalnya lembaga peternak sehingga tidak mempunyai posisi tawar
- p) Terbatasnya infrastruktur peternakan
- q) Terbatasnya pasokan bibit ternak

G. Masalah Infrastruktur wilayah

- a) Masih rendahnya kualitas jalan kabupaten dan poros Nagari.
- b) Belum optimalnya pengelolaan saluran irigasi
- c) Masih rendahnya tingkat pelayanan sanitasi lingkungan.
- d) Masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih perNagarian.

H. Masalah Bencana Alam

- a) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana alam.
- b) Kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam upaya mengurangi tingkat kerentanan terhadap dampak bencana masih belum dilakukan dengan baik.
- c) Koordinasi yang masih parsial, sektoral dan kurang terpadu dalam penanganan bencana.

I. Masalah dibidang aparatur

- a) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga struktur organisasi kurang proporsional;
- b) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- c) Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi;
- d) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;

- e) Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
- J. Masalah Investasi, industri, perdagangan, dan perkoperasian
- a) Lahan peruntukan kegiatan usaha yang ditentukan pemerintah daerah masih dikuasai oleh masyarakat sehingga investor sering menghadapi kesulitan dalam mendirikan tempat usaha.
 - b) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi.
 - c) Kurangnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha bagi investor.
 - d) Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi.
 - e) Iklim persaingan usaha yang kurang sehat.
 - f) Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan dan promosi pariwisata.
 - g) Keterbatasan pangsa pasar (*market share*) dan rendahnya kualitas sarana pasar tradisional.
 - h) Semaraknya penyebaran produk-produk yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran dan pelabelan serta meningkatnya produk dengan penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
 - i) Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.
 - j) Lemahnya kinerja koperasi dan menurunnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
- K. Masalah Pariwisata dan Budaya
- a) Potensi pariwisata daerah yang kurang dikembangkan.
 - b) Budaya daerah yang semakin tersisih dan ditinggalkan.
- L. Masalah Hukum
- a) Permasalahan hukum yang cukup menonjol adalah pelanggaran terhadap peraturan daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicitakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun

2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

5.1. Misi

Misi pembangunan 2016-2021 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi 2021 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera. Misi pembangunan 2015-2021 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan kedepan. Usaha-usaha Perwujudan visi 2021 akan dijabarkan dalam misi daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut.

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Penjelasan masing-masing Misi :

1. Misi Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan (akta kelahiran ,KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2. Misi Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu infrastruktur perekonomian, infrastruktur sosial dan sektor unggulan daerah.

Infrastruktur perekonomian yang dimaksud pada misi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Pembangunan infrastruktur perekonomian menggunakan prinsip berkelanjutan melalui penerapan infrastruktur hijau sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kekinian tetapi juga masa yang akan datang (pembangunan infrastruktur tidak bertabrakan dengan lingkungan dan ekosistem)

Infrastruktur sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah infrastruktur non fisik dalam bentuk kelembagaan dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Sektor unggulan daerah yang dimaksud dalam misi ini adalah perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi PDRB terbesar (sektor unggulan) yaitu pertanian dan

perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu (1) mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dan (2) mengembangkan nilai budaya ABS-SBK.

Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substantif tersebut yakni nilai *Kebenaran, Kejujuran, Keadilan* yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatkan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, dengan cara diantaranya: (1). Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2). Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan nilai tambah yang dimaksud dalam misi ini meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pariwisata. Peningkatan nilai tambah dikategorikan menjadi dua yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Nilai tambah pengolahan meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Nilai tambah untuk pemasaran meliputi harga output produksi, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input selain

bahan baku dan tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui (1) Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2). Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran produksi; (3). Mengefisiensikan biaya pengolahan; dan (4). Memperpendek mata rantai pemasaran.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam misi ini adalah dalam rangka mewujudkan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah yang secara terus menerus dari hulu sampai hilir dengan pengembangan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Misi lima memuat dua kata kunci yaitu (1) peran struktur sosial; dan (2) pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Peran struktur sosial yang dimaksud dalam misi ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Peran struktur sosial ditujukan untuk memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan indikator berfungsinya peran struktur sosial. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (Satu) dan Tujuan 1 (Satu) dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

Misi 1 :Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur yang Bersih Dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dari KKN, Akuntabel Dan Berkinerja, Serta Pelayanan Publik yang Prima

Untuk menjawab dan mencapai Misi dan tujuan tersebut Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan dua tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
2. Tercapainya target pembangunan daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan empat sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan peta berstandar
2. Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan
4. Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan

Empat sasaran strategis tersebut dijabarkan dengan beberapa program diantaranya:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Kerjasama Pembangunan
6. Pengembangan Wilayah Perbatasan
7. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
9. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
12. Program Perencanaan Sosial Budaya
13. Perencanaan Prasaana Wilayah dan Sumber daya alam
14. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
15. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENENTRIAN BAPPENAS DAN BAPPEDA PROVINSI DAN BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang bermartabat dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementrian Bappenas yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL, KREDIBEL, DAN PROAKTIF UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”

PENJELASAN VISI

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

1. **Andal** : Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan
2. **Kredibel** : Menerapkan prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas
3. **Proaktif** : Antisipatif dan aktif dalam turut menentuka arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional

PENJELASAN MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

PENJELASAN MISI

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, ada 3 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara". Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Presiden, kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil *think tank*, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai *think tank* ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai *administrator*, melekat dalam semua kegiatan khususnya

dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

PENJELASAN TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan tugas-tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (*damages and losses assessment*) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (*needs assessment*) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan sebagainya.

Visi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

”Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi”

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

1. Perencanaan yang partisipatif dimaksudkan adalah perencanaan yang mengakomodir partisipasi berbagai pihak pelaku pembangunan melalui penjangkaran aspirasi baik langsung maupun tidak langsung.
2. Perencanaan yang efektif dimaksudkan adalah perencanaan yang rasional dan dapat diaplikasikan melalui berbagai kegiatan baik bersumberkan dana APBN, APBD, swasta dan partisipasi masyarakat.

3. Perencanaan yang akuntabel dimaksudkan adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Visi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Meningkatkan pembinaan, fasilitasi lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah
3. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
4. Mewujudkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
5. Mewujudkan aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas.
6. Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 akan menjadi pedoman dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk 15 tahun ke depan. Tata Ruang tersebut, akan diatur dalam Perda RTRW 2011-2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Tujuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah mensinergiskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan, dan program yang tertuang dalam RTRW.

Mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis yang diperkirakan akan saling berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program yang disusun; Mengkaji pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup; Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

Merekomendasikan perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengingat isu-isu permasalahan lingkungan hidup strategis di Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan analisa data dan informasi di Kabupaten Pesisir selatan, dirumuskan isu-isu strategis yang sebagai permasalahan-permasalahan utama yang sedang dan akan dihadapi pada lima tahun mendatang dengan menggunakan analisis yaitu antara lain :

- Analisa Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi Pesisir Selatan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

a. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Identifikasi dan analisa lingkungan internal Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

b. Identifikasi dan Analisa Kekuatan Daerah

- Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya pertanian, kelautan dan perikanan;
- Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah laut yang sangat potensial bagi perolehan devisa, khususnya dari komoditi perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
- Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi wisata bahari yang cukup kaya dan beragam;
- Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pelabuhan yang melayani angkutan lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengangkutan laut di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Identifikasi dan Analisa Kelemahan Daerah

- Terdegradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda, dan tergerusnya pelaksanaan nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus.

- Masih terbatasnya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana perhubungan laut dan darat; prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih, pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
- Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat nagari yang relatif tertinggal;
- Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di nagari dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
- Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama kelautan dan perikanan, dan pertanian sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;
- Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha.

d. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

e. Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- 1) Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi yang dihasilkan Kabupaten Pesisir Selatan seperti hasil perikanan dan pertanian;
- 3) Perluasan jaringan dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi

masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

- 4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 5) Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun wisata budaya Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:
 - a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat;
 - b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat.;
 - c. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.
- 7) Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
 - a. Dengan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;

- b. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.
- f. Identifikasi dan Analisa Ancaman Daerah
- 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:
 - a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam termasuk laut, pesisir dan sumberdaya alam lainnya seperti hutan dan tambang secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan;
 - b. Pesisir Selatan masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara regional maupun pasar internasional akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2) Demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi kelangsungan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:
 - a. Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat;
 - c. Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.
 - 3) Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:
 - a. Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang

sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. Persaingan antar daerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
- c. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
- d. Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isuisu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Penentuan Isu Strategis Menggunakan metode pembobotan berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi vertical
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab organisasi
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap public

4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

3.5.1 Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan strategis eksternal dan internal, isu strategis daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

(1) Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik

- a. Belum optimalnya peran penyelenggara pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat;
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan lingkungan hidup;
- c. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- d. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;

(2) Belum optimalnya pengembangan ekonomi

- a. Terbatasnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan pertanian sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasarana pemasaran dan terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasarana pelabuhan dan terbatasnya industri pengolahan hasil perikanan;

- c. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan yang disebabkan oleh terbatasnya prasarana dan sarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan pariwisata, belum berkembangnya kegiatan festival seni budaya, dan belum optimalnya promosi dan pemasaran.

(3) Belum tertatanya infrastruktur daerah

- a. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antarnagari dan antarkecamatan;
- c. Terbatasnya transportasi laut terutama dalam menghubungkan antarpulau;
- d. Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat dan laut yang menghubungkan seluruh wilayah nagari dan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.

(4) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

- a. Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan, belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah;
- b. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- c. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.
- d. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan

- kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
- e. Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan pada isu strategis daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka isu strategis Bapedalitbang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi manajemen dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
2. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen;
3. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
4. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan prasarana sarana kota dan lingkungan hidup;
5. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan perekonomian;
6. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan pemerintahan;
7. Optimalisasi program, pembiayaan dan pembangunan;
8. Optimalisasi pendistribusian data dengan menggunakan teknologi informasi;
9. Optimalisasi sistem manajemen data informasi yang akurat dan akuntabel;
10. Optimalisasi koordinasi dan konsultasi dengan SKPD atau organisasi lain;
11. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan yang berkualitas dan inovatif;
12. Optimalisasi inisiasi pembangunan Sistem Inovasi Daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”..**

Penjelasan Visi:

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban menyusun rencana pembangunan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Berkualitas memiliki makna bahwa perencanaan yang disusun harus memiliki prinsip partisipatif, aplikatif dan terintegrasi antar sektor, antar ruang dan antar waktu.

Makna visioner adalah memiliki wawasan ke depan yang selalu mengutamakan prinsip berkesinambungan.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bapedalitbang. Rumusan misi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”**

Penjelasan Misi

6. Misi Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan (akta kelahiran ,KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Misi – Tujuan

Misi	Tujuan
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
	2. Tercapainya Target Pembangunan Daerah

4.2.2. Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarnya.



Tabel 4.2.
Tujuan-Sasaran-Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan peta berstandar	1. persentase perencanaan perurusan yang sudah disertai dengan peta berstandar
	2. Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja
2. Tercapainya target pembangunan daerah	1. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	1. persentase capaian program pembangunan
	2. Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	1. persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM

Dari tabel 4.2 diatas merupakan rangkaian tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Bapedalitbang atau setara dengan eselon II. Sedangkan untuk sasaran dan indikator eselon III dan IV dapat dilihat pada lampiran



TABEL T-IV.C.24
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (tahun akhir Renstra)	sasaran strategis	Indikator sasaran	target kerja sasaran pada tahun ke- (%)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	95%	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar	Persentase Perencanaan per urusan yang sudah disertai dengan Peta terstandar (%)	65	75	80	90	90	95
				Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Lainnya (%)	85	90	90	95	95	95
2	Tercapainya target rencana pembangunan daerah	Persentase Capaian Program Pembangunan	95%	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	Persentase Capaian Program Pembangunan (%)	90	95	95	95	95	95
				Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM (%)	80	85	90	90	95	95

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan I : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas		
1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta	1. Penguatan kapasitas SDM perencana dalam mengoperasikan aplikasi SIG 2. Optimalisasi ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi public 2. Peningkatan verifikasi, validasi dan analisis data data serta informasi pembangunan
1. Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Optimalisasi prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program 2. Optimalisasi kesesuaian Perencanaan dengan	1. Peningkatan fokus pembiayaan pembangunan pada program yang bersifat Holistik, tematik, ntegratif dan spasial 2. Peningkatan pembiayaan tahunan berdasarkan prioritas pembangunan

	Penganggaran	
Tujuan II : Tercapainya target rencana pembangunan daerah		
1. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	<div>1. Optimalisasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah berdasarkan kinerja rencana pembangunan</div> <div>2. Optimalisasi fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan</div>	1. Peningkatan kinerja evaluasi pencapaian sasaran pembangunan tahunan terhadap sasaran jangka menengah maupun jangka panjang
1. Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	<div>1. Meningkatkan esesuaian Pendanaan Renja OPD dengan Target Prioritas RKPD</div> <div>2. Meningkatkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD</div>	<div>1. Peningkatan sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas RKPD</div> <div>2. Peningkatan Hasil Evaluasi Renja OPD</div>

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan I : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas		
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta	3. Penguatan kapasitas SDM perencana dalam mengoperasikan aplikasi SIG 4. Optimalisasi ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan	3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi public 4. Peningkatan verifikasi, validasi dan analisis data data serta informasi pembangunan

2. Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	3. Optimalisasi prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program 4. Optimalisasi kesesuaian Perencanaan dengan Penganggaran	3. Peningkatan fokus pembiayaan pembangunan pada program yang bersifat Holistik, tematik, ntegratif dan spasial 4. Peningkatan pembiayaan tahunan berdasarkan prioritas pembangunan
Tujuan II : Tercapainya target rencana pembangunan daerah		
2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	3. Optimalisasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah berdasarkan kinerja rencana pembangunan 4. Optimalisasi fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	2. Peningkatan kinerja evaluasi pencapaian sasaran pembangunan tahunan terhadap sasaran jangka menengah maupun jangka panjang
2. Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	3. Meningkatkan esesuaian Pendanaan Renja OPD dengan Target Prioritas RKPD 4. Meningkatkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD	3. Peningkatan sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas RKPD 4. Peningkatan Hasil Evaluasi Renja OPD

TABEL T-V.C.28

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD : Bapedalitbang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	target Tujuan (target akhir Renstra)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														TARGET CAPAIAN PADA TAHUN AKHIR RENSTRA	OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra						
									Target kinerja	Target Rp. (lt)	Target kinerja	Target Rp. (lt)	Target kinerja	Target Rp. (lt)	Target kinerja	Target Rp. (lt)	Target kinerja	Target Rp. (lt)	Target kinerja	Target Rp. (lt)	Target kinerja	Target Rp. (lt)					
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	90%	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar	Persentase perencanaan perurusan yang sudah disertai dengan peta berstandar	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	80%	80%	115,000	80%	530,000	80%	255,000	90%	85,000	90%	90,000	100%	95,000	100%	95,000	100%	Bapedalitbang	Pessel		
						1	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RTRW	0	1	35,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bapedalitbang	Pessel	
						2	Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030	tersusunnya revisi dokumen RTRW	0	0	-	1	450,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bapedalitbang	Pessel	
						3	Pengesahan Perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	Tersusunnya Dokumen peraturan daerah tentang revisi RTRW Kab. Pesisir	0	0	-	0	-	1	175,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bapedalitbang	Pessel	
						4	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	persentase Program Urusan pedesaan yang terkoordinir	80%	80%	80,000	80%	80,000	90%	80,000	90%	85,000	90%	90,000	95%	95,000	95%	95,000	95%	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang	80%	85%	220,000	90%	100,000	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	Bapedalitbang	Pessel		
						1	Penyusunan Database Prasarana Wilayah dan SDA Berbasis Informasi Geografis (GIS)	Tersedianya database prasarana wilayah berbasis GIS	0%	1	220,000	1	100,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompotensi	10	10	75,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	50	75,000	50	75,000	50%	Bapedalitbang	Pessel		
						1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya peningkatan SDM aparatur bappeda	10	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	75,000	15	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	3 dokumen	3 dokumen	60,000	5 dokumen	150,000	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	5 dokumen	Bapedalitbang	Pessel		
							Penyusunan Kajian KLHS Revisi RTRW	tersedianya dokumen KLHS RTRW	0	0	-	1	150,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bapedalitbang	Pessel	
							Koordinasi dan asistensi penyusunan renstra RKPD			100	60,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	-	5 kerjasama	250,000	5 kerjasama	-	5 kerjasama	-	5 kerjasama	-	5 kerjasama	-	5 kerjasama	-	5 kerjasama	Bapedalitbang	Pessel		
							Penyusunan materplan Pendidikan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	0%	0	-	1	250,000	1	-	1	-	1	-	1	-	0	1	0	1	Bapedalitbang	Pessel
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	80,000	90%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	Bapedalitbang	Pessel		
							Penyusunan Profil Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	tersusunya buku profil pasar	1	1	80,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	-	5 kerjasama	360,000	5 kerjasama	60,000	5 kerjasama	60,000	5 kerjasama	60,000	5 kerjasama	60,000	5 kerjasama	60,000	5 kerjasama	Bapedalitbang	Pessel		
							Penyusunan Masterplan Pendidikan	Tersedia Dokumen Masterplan / perbub	0%	0	-	0	-	1 master plane	300,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Bapedalitbang	Pessel	
							Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman	Terkoordinirnya Program Urusan	90%	90%	-	90%	-	90%	60,000	90%	60,000	90%	60,000	90%	60,000	90%	60,000	90%	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah						-		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		Bapedalitbang	Pessel		
						Penataan Kawasan pariwisata Berbasis Daur Ulang	Terciptanya Penataan Kawasan pariwisata Berbasis Daur Ulang	0	0	-	0	0	1 kawasan	150,000	1 kawasan	150,000	1 kawasan	150,000	1 kawasan	150,000	1 kawasan	150,000	1 kawasan	Bapedalitbang	Pessel		

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

						Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	80%	30%	150,000	80%	150,000	85%	150,000	90%	150,000	100%	150,000.0	100%	150,000.00	100%	150,000.00	50%	Bapedalitbang	Pessel
						1 Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Terkoordinasikannya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	Bapedalitbang	Pessel
				Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	Keselarasn RPJMD dengan dokumen lainnya	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	3 dokumen	3 dokumen	580,000	5 dokumen	250,000	3 dokumen	500,000	3 dokumen	350,000	3 dokumen	350,000	3 dokumen	350,000	3 dokumen	250,000	5 dokumen	Bapedalitbang	Pessel
						Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2021	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	0	1	350,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	Bapedalitbang	Pessel
						Sosialisasi RPJMD	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	0	0	80,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
						Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terlaksananya musrenbang RKPD	1	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	Bapedalitbang	Pessel
						Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
						Pengesahan perubahan perda RPJM Pessel		-	-	-	-	-	100	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
						Koordinasi penyusunan penganggaran daerah		-	-	-	-	-	100	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	-	0	Bapedalitbang	Pessel
						Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	150,000	5 kerjasama	-	5 kerjasama	250,000	5 kerjasama	-	5 kerjasama	-	5 kerjasama	250,000	5 kerjasama	-	5 kerjasama	Bapedalitbang	Pessel
						Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten	Terlaksananya Fasilitas dan Sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten	0%	0	-	0	-	182 nagari	250,000	0	-	-	182 nagari	250,000	0	-	0	0	Bapedalitbang	Pessel
						Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	0%	1	150,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Bapedalitbang	Pessel
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	470,000	4 Dokumen	500,000	4 Dokumen	510,000	4 Dokumen	520,000	4 Dokumen	530,000	4Dokumen	590,000	4Dokumen	440,000	4 Dokumen	Bapedalitbang	Pessel
						Penyusunan Rancangan RKPD	tersusunnya dokumen RKPD	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	Bapedalitbang	Pessel
						Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	Bapedalitbang	Pessel

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

						Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	tersusunya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	170,000	2	Bapedalitbang	Pessel		
						Penyusuna rancangan rencana strategis SKPD		-	100	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Penilaian unit kerja penyusunan dokumen berprestasi		-	100	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						evaluasi RKPD		-	-	-	100.00	60,000	100.00	70,000	100.00	80,000	100.00	90,000	100.00	150,000	-	-	-		
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	185,000	6 Dokumen	185,000	6 Dokumen	185,000	6 Dokumen	185,000	6 Dokumen	185,000	6 Dokumen	185,000	6 Dokumen	185,000	Bapedalitbang	Pessel	
						Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertangunjawaban (LKPIJ)	Tersusunya laporan LKPJ kepala daerah	1	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000	1	110,000			1
						Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunya perjanjian Kinerja	1	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000			1
						Koordinasi pengembangan pembangunan daerah tertinggal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100,000	-	-	-			
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	80%	85%	75,000	90%	82,500	95%	90,750	95%	99,825	95%	109,807	95%	120,788	95%	120,788	95%	Bapedalitbang	Pessel
						Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Tersusunya perjanjian Kinerja	80%	85%	75,000	90%	82,500	95%	90,750	95%	99,825	95%	109,807	95%	120,788.25	95%	120,788.25	0.95		
						Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	150,000	5 kerjasama	160,000	5 kerjasama	470,000	5 kerjasama	180,000	5 kerjasama	190,000	5 kerjasama	200,000	5 kerjasama	200,000	5 kerjasama		
						Masterplan Pengelolaan SDA dan LH	Tersedianya Buku Masterplan Pengelolaan SDA dan LH	0%	0	-	0	-	1	300,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Penyusunan Perjanjian Kinerja	Terlaksananya buku Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Bupati	95%	75	150,000	80	160,000	85	170,000	90	180,000	90	190,000	90	200,000	90	200,000	90	Bapedalitbang	Pessel
						Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah		-	-	-		107,326		-		-		-		-		-	Bapedalitbang	Pessel	
						Forum inovasi daerah	Tersedianya Dokumen Inovasi Daerah	-	-	-	1 dokumen	107,325.93	-		-		-		-		-	1 dokumen	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	Bapedalitbang	Pessel
						Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	tersusunya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	0%	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Bapedalitbang	Pessel

				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Program pembangunan	Persentase capaian program pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi pendukung perencanaan pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	100,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	250,000	1 aplikasi	Bapedalitbang	Pessel
				kegiatan pembangunan		1 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terkelolanya e-planning	0	1	100,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	Bapedalitbang	Pessel
						Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	80%	85%	100,000	90%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	250,000		Bapedalitbang	Pessel
						2 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terkelolanya e-planning	1	1	100,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	Bapedalitbang	Pessel
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	80%	80%	638,187	80%	780,187	80%	2,148,187	80%	918,187	90%	788,187	90%	958,187	90%	808,187	90%	Bapedalitbang	Pessel
						1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	70	70	194,500	75	204,500	75	214,500	75	219,500	90	224,500	90	229,500	90	229,500	90	Bapedalitbang	Pessel
						2 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	75	75	96,611	80	106,611	80	116,611	80	121,611	90	126,611	90	131,611	90	131,611	90	Bapedalitbang	Pessel
						3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	75	75	177,076	80	187,076	80	197,076	80	202,076	90	207,076	90	212,076	90	212,076	90	Bapedalitbang	Pessel
						4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas OPD	75	75	130,000	80	140,000	80	150,000	80	155,000	90	160,000	90	165,000	90	165,000	90	Bapedalitbang	Pessel
						5 Pembangunan Gedung Arsip dan Rumah Jaga	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	10	10	20,000	80	-	80	1,000,000	80	-	95	-	95	-	95	-	95	Bapedalitbang	Pessel
						6 Penataan Gedung kantor dan Lingkungan Bapedalitbang	Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur	10	10	20,000	80	-	80	400,000	80	-	95	-	95	-	95	-	95	Bapedalitbang	Pessel
						Pengadaan kendaraan dinas operasional		-	-	-	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	-	Bapedalitbang	Pessel

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

						pengadaan kendaraan dinas		-	-	-	3 unit	72,000	-	-	5 unit	150,000	-	-	5 unit	150,000	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	160,000	6 Dokumen	160,000	6 Dokumen	160,000	6 Dokumen	160,000	6 Dokumen	160,000	6 Dokumen	160,000	6 Dokumen	160,000	6 Dokumen	Bapedalitbang	Pessel	
						2 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	1	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	160,000	1	Bapedalitbang	Pessel	
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	80%	85%	200,000	90%	210,000	95%	221,000	95%	233,100	95%	246,410	95%	261,051	95%	161,051	95%	Bapedalitbang	Pessel	
						1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	80%	85%	100,000	90%	110,000	95%	121,000	95%	133,100	95%	146,410	95%	161,051	95%	161,051	0.95	Bapedalitbang	Pessel	
						2 Koordinasi perencanaan bidang ekonomi				100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	100%	100,000			Bapedalitbang	Pessel		
						Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	185,000	5 kerjasama	Bapedalitbang	Pessel	
						1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga	terkoordinasikannya kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga	5 kerjasama	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	85,000	5 kerjasama	Bapedalitbang	Pessel	
						2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan, SDA, dan LH	Terkoordinirnya Program Urusan	90%	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	90%	100,000	0.9	Bapedalitbang	Pessel	
						3 Koordinasi pembangunan antar daerah		80%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	200,000	-	-	-				
						Program Penelitian dan Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah		80%	80%	-	80%	-	80%	90,000	90%	100,000	95%	150,000	100%	175,000	100%	175,000	100%	Bapedalitbang	Pessel	
						Koordinasi Kelitbangan		0	0	-	0	-	80%	90,000	90%	100,000	95%	150,000	1	175,000	1	175,000	1	Bapedalitbang	Pessel	
				Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan dengan sasaran RPJM n	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat integrasi data pembangunan	85%	85%	290,000	90%	250,000	90%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	250,000	95%	Bapedalitbang	Pessel	
							1 Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi updating data sektoral daerah	1 laporan	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	100,000	1 laporan	Bapedalitbang	Pessel
							2 penyedia data statistik			1 lap	40,000															
							3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	tersosialisasinya program-program pembangunan		75%	80%	50,000	85%	50,000	90%	50,000	95%	50,000	95%	50,000	95%	50,000	95%	50,000	95%	Bapedalitbang

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

						4	Penyusunan Profil Daerah	tersusunya profil daerah	1 dokumen	100%	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	Bapedalitbang	Pessel		
							Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang terkoordinasikan	80%	85%	200,000	90%	420,000	95%	442,000	95%	666,200	95%	442,820	95%	472,102.00	95%	322,102.00	0.95	Bapedalitbang	Pessel
						1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi budaya	80%	85%	150,000	90%	165,000	95%	181,500	95%	199,650	95%	219,615	95%	241,576.50	95%	241,576.50	0.95	Bapedalitbang	Pessel
						2	Koordinasi Aksi PPK	terlaksananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	80%	85%	50,000	90%	55,000	95%	60,500	95%	66,550	95%	73,205	95%	80,525.50	95%	80,525.50	0.95	Bapedalitbang	Pessel
						3	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	tersusunya starteji dan kebijakan penangulangankemiskinan	0%	0	-	0	-	1	200,000	1	-	1	-	1	0	1	0	1	Bapedalitbang	Pessel
						4	Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	0%	0	-	0	-	0	-	1	250,000	1	-	1	0	1	0	1	Bapedalitbang	Pessel
						5	Koordinasi Kabupaten sehat		-	-	-	-	-	-	100	50,000	100	50,000	100	50,000	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
						6	Penyusunan database pendidikan berbasis GIS		-	-	-	100	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
						7	Koordinasi kabupaten sehat 2019		-	-	-	-	-	-	100	100,000	100	100,000	100	100,000	-	-	-	-	Bapedalitbang	Pessel
							Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	80%	85%	565,000	90%	321,500	95%	241,500	95%	246,500	95%	881,500	95%	256,500	95%	256,500		Bapedalitbang	Pessel
						1	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	80%	85%	165,000	90%	181,500	95%	181,500	95%	181,500	95%	181,500	95%	181,500	95%	181,500	95%	Bapedalitbang	Pessel
						2	Koordinasi Loan WISM	terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program WISMP	80%	85%	200,000	90%	70,000	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	Bapedalitbang	Pessel
						3	Koordinasi IPDMIP	Terlaksananya rapat koordinasi mengenai sanitasi permukiman	90%	-	-	-	75%	60,000	80%	65,000	85%	700,000	90%	75,000	90%	75,000		Bapedalitbang	Pessel	
						4	Penunjang WISM		80%	85%	200,000	90	70,000	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-		Bapedalitbang	Pessel

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

						Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah	Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	40%	50%	255,000	60%	475,000	70%	255,000	80%	255,000	90%	255,000	100%	255,000	100%	255,000	100%	Bapedalitbang	Pessel	
						1 Koordinasi Program PAMSIMAS	terkoordinasikannya program PMSIMAS	40%	50 persen	180,000	60 persen	180,000	70 persen	180,000	80 persen	180,000	90 persen	180,000	100 persen	180,000	100 persen	180,000	100 persen	Bapedalitbang	Pessel	
						2 Koordinasi Program AMPL dan PPSP	terkoordinasikannya program AMPL dan PPSP	40%	50 persen	75,000	60 persen	75,000	70 persen	75,000	80 persen	75,000	90 persen	75,000	100 persen	75,000	100 persen	75,000	100 persen	Bapedalitbang	Pessel	
						3 Replikasi pengelolaan data AMPL		-	-	-	100	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	85%	150,000	90%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	95%	Bapedalitbang	Pessel
						1 Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	0%	1	90,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Bapedalitbang	Pessel	
						2 Pengesahan RANPERDA BUMD		-	100	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah		-	-	-		192,977		755,000		815,000		860,000		915,000		815,000		Bapedalitbang	Pessel	
						1 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan pemma Daerah	90%	0	-	0	0	80%	70,000	90%	85,000	95%	100,000	1	120,000	1	120,000	1	Bapedalitbang	Pessel	
						2 Sinkronisasi Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan dalam sistem informasi daerah	0	0	-	0	0	80%	70,000	90%	80,000	95%	95,000	1	100,000	1	100,000	1	Bapedalitbang	Pessel	
						3 Peningkatan Kapasitas SDM Kelitbangan	Persentase SDM kelitbangan yang meningkat	0	0	-	0	0	80%	50,000	90%	75,000	90%	85,000	90%	100,000	100%	100,000	100%	Bapedalitbang	Pessel	
						4 Pengkajian Pemanfatan Dana Desa	Persentase dana desa yang tepat sasaran	0%	0	-	0	0	65%	65,000	75%	75,000	80%	80,000	90%	95,000	90%	95,000	95%	Bapedalitbang	Pessel	
						5 Pelaksanaan Pengkajian Peraturan perundang-Undangan	Adanya Pengkajian Peraturan perundang-Undangan	0	0	-	0	0	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	1 kajian	200,000	1 kajian	Bapedalitbang	Pessel	
						6 Penguatan Kerja sama Kelitbangan	Adanya Penguatan Kerja sama Kelitbangan	0	0	-	0	0	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	200,000	1 kerjasama	Bapedalitbang	Pessel	
						8 Pengembangan inovasi pada generasi muda	Terciptanya inovasi pada generasi muda	0	0	-	3 Inovasi	92,976.60	3 Inovasi	100,000	3 Inovasi	100,000	3 Inovasi	100,000	3 Inovasi	100,000	0		0	Bapedalitbang	Pessel	

Rencana Strategis Tahun 2016-2021

						9	Forum Inovasi daerah				100	100,000																
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompetensi (orang)	50	50	320,000	50	370,000	50	375,000	50	380,000	50	385,000	50	390,000	50	320,000			50	Bapedalitbang	Pessel
						1	Bimbingan Teknis Penusunan Perencanaan Daerah	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pemda kab pessel	50	#REF!	150,000	#REF!	150,000	#REF!	150,000	#REF!	150,000	50	150,000	#REF!	150,000	#REF!	150,000			50	Bapedalitbang	Pessel
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlayani	90%	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000			90%	Bapedalitbang	Pessel
						1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)	90%	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000	90%	85,000			90%	Bapedalitbang	Pessel
						2	Penunjang operasional perencanaan pelaporan		-	-	-	100%	50,000	100%	55,000	100%	60,000	100%	65,000	100%	70,000	-	-				Bapedalitbang	Pessel
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-				Bapedalitbang	Pessel
						1	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapan		-	-	-	-	-	-	-	100	150,000	-	-	100	150,000	-	-				Bapedalitbang	Pessel
							Prog Penelitian & Pembangunan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah		-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	-	-				Bapedalitbang	Pessel
						1	Pengkajian pemanfaatan dana desa		-	-	-	-	-	100	60,000	100	60,000	100	60,000	100	60,000	-	-				Bapedalitbang	Pessel
						2	Penataan Kawasan pariwisata Berbasis Daur Ulang		-	-	-	-	-	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	-	-				Bapedalitbang	Pessel
						3	kajian strategis pembukaan jalan kambang Muaro - labuah		-	-	-	-	-	100	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-				Bapedalitbang	Pessel

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Utama Bapedalitbang Tahun 2016 – 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Pada Awal Renstra	Target Kinerja Sasaran					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Meningkatkan koordinasi, sumber daya manusia dan kualitas perencanaan daerah yang sinergis, aplikatif, partisipatif dan terintegrasi	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang selaras	% tujuan, sasaran indikator kinerja Renstra OPD yang selaras dengan RPJM	25	33	66	100	100	100	100
			Meningkatkan kualitas monev dalam pembangunan	% Program Kegiatan APBD yang bersumber dari RKPD	95	98	100	100	100	100	100
				% Program kegiatan yang dalam pelaksanaanya mencapai target	85	85	87	87	90	90	90
II	Mengefektifkan kajian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi yang berkualitas dan muthakhir.	Mendukung Perencanaan Pembangunan Berbasis Kajian Ilmiah	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah penelitian yang diimplementasikan	3	3	3	3	3	3	3
			Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pemanfaatan penelitian dan pengembangan yang dijadikan untuk perumusan kebijakan	3	3	3	3	3	3	3

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Misi I : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan Responsif dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.

N O	SASARAN	Indikator Sasaran		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		1. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:		CC	CC	BB	BB	A	A	A
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1	Perencanaan Kinerja							
		2	Pengukuran Kinerja							
		3	Pelaporan Kinerja							
		4	Evaluasi Kinerja							
		5	Capaian Kinerja							

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang, seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi dan misi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka seluruh aparatur Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya, semoga perencanaan strategis yang disusun Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bapedalitbang secara proporsional.

